

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL PROCUREMENT PLAN INFORMATION SYSTEM (SIRUP) APPLICATION AT THE EAST JAVA PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY

Ilham Ferdiansyah¹, Dian Arlupi Utami²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email : ilham.20070@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email : dianarlupi@unesa.ac.id

Abstrak

e-government merupakan sebuah metode untuk menerapkan pengaturan dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, atau telematika yang membuka peluang untuk meningkatkan serta mengoptimalkan interaksi antar departemen pemerintah dan hubungan antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat umum. Tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mendorong penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bagian dari e-government. Di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur, aplikasi SIRUP diimplementasikan untuk mendukung proses pengadaan yang lebih terbuka dan efektif. Namun, penerapan aplikasi ini menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan teknis berupa server error, kurangnya sosialisasi yang memadai, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menjelaskan fenomena tersebut. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola pengadaan barang dan jasa di BAWASLU Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian menggunakan Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016) yang meliputi support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIRUP memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan proses pengadaan serta mentransparasikan proses pengadaan yang sedang dilaksanakan, dan juga penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur telah memiliki payung hukum yang jelas namun penerapan aplikasi SIRUP harus meningkatkan sosialisasi kepada pengguna aplikasi, meningkatkan sistem dari aplikasi SIRUP serta penambahan alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola aplikasi SIRUP.

Kata Kunci: Aplikasi Sirup, E-government, Bawaslu

Abstract

E-government is a method for implementing the regulation and execution of government tasks through the utilization of information and communication technology, or telematics, which creates opportunities to enhance and optimize interactions between government departments as well as relationships between the government, the private sector, and the general public. The demand for transparency, efficiency, and accountability in government procurement of goods and services has driven the adoption of the General Procurement Plan Information System

(SIRUP) application as part of e-government. At the Election Supervisory Agency (BAWASLU) of East Java Province, the SIRUP application is implemented to support a more open and effective procurement process. However, its implementation faces various challenges, such as technical disruptions in the form of server errors, a lack of adequate socialization, and limited human resources assigned to manage the application. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to understand and explain these phenomena. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving procurement managers at BAWASLU of East Java Province. The research focuses on the elements of Electronic Government implementation based on studies and research conducted by Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2016), which include support, capacity, and value. The findings indicate that the SIRUP application has significant benefits in improving the procurement process and enhancing transparency in ongoing procurement activities. Additionally, the implementation of the SIRUP application at BAWASLU of East Java Province is supported by clear legal frameworks. However, the application's implementation needs to be improved by increasing user socialization, enhancing the system, and allocating additional human resources to manage the SIRUP application effectively

Keywords: *Sirup Application, E-government, Bawaslu*

Pendahuluan

Revolusi industri mempunyai andil yang cukup besar dalam perkembangan teknologi di dunia. Pada revolusi industri gelombang ketiga pada tahun 1970an amerika serikat memperkenalkan teknologi informasi (IT) serta komputerisasi sebagai penunjang otomatisasi produk (production autimation). Revolusi gelombang ketiga begitu cepat menyebar dari benua eropa hingga asia. Pada revolusi industri gelombang keempat merupakan penerapan teknologi modern dari era 2000an hingga saat ini, Revolusi industri gelombang keempat meliputi teknologi fiber (fiber technology) serta sistem jaringan terintegrasi (integrated network). Revolusi industri juga bisa disebut sebagai pembauran teknologi yang mampu mengintegrasikan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan (Ningsih, 2018).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas pengaruh perkembangan teknologi telah banyak membantu pekerjaan manusia, Bahkan berpengaruh besar bagi perkembangan suatu negara. Dimana saat ini perkembangan teknologi sudah menghasilkan suatu sistem yaitu e-government. Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Penerapan e-government telah menjadi sebuah terobosan penting dalam transformasi publik. Penerapan e-government di sektor pemerintahan dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan teknologi informasi, yang diharapkan akan mengubah cara berpikir dan pandangan masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan dengan fokus pada kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Implementasi e-government juga sering diidentifikasi sebagai salah satu langkah reformasi birokrasi untuk mencapai good governance (Septiani, 2021).

Penerapan e-government merupakan wujud dari pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan proses perubahan menuju e-government di setiap sektor bidang pemerintahan. Melalui proses transformasi ini, pemerintah dapat mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi untuk menghapuskan hambatan-hambatan dalam organisasi birokrasi dan membentuk sistem manajemen serta proses kerja yang memungkinkan kerjasama terpadu antara instansi-instansi pemerintah. Ini bertujuan untuk menyederhanakan akses ke seluruh informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, semua lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat

memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara efisien setiap saat (Septiani, 2021).

Salah satu strategi dalam implementasi e-government untuk mencapai good governance adalah melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) fungsi utama dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) sendiri adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparansi, efesiensi, efektif, serta akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan. Hal ini mendorong perilaku pemerintah untuk terus melakukan peningkatan dalam sektor pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk memutus rantai korupsi, (Yon Mariono, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan sisitem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik memanfaatkan e-marketplace yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Pemerintah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan e-maketplace. Lembaga Kebjakan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah instansi pemerintah yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada presiden berdasarkan peraturan presiden Nomor 93 Tahun 2022. Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan membentuk aplikasi e-procurement.

Pada penelitian ini akan meneliti mengenai aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang merupakan bentuk dari penerepan e-procurement. SIRUP merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang berbasis website sebagai wadah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah/Daerah (K/L/P/D). RUP sendiri memuat beberapa hal antara lain adalah nama dan Alamat kementrian/Lembaga/Pemerintah/daerah, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, serta perkiraan besaran penggunaan biaya (LKPP, 2021). Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah meginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan kesekretariatan Lembaga negara untuk melaksanakan seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Maka dari itu penggunaan aplikasi SIRUP di setiap Lembaga pemerintahan dirasa dapat membantu pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat lebih transparan.

Aplikasi SIRUP digunakan di beberapa lembaga pemerintahan, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Surat Edaran 34 Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Kebijakan Pengisian Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 Pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), maksud dari surat edaran tersebut adalah untuk menghimbau kepada masing masing Satuan Kerja Bawaslu untuk menginput Rencana Umum Pengadaan

(RUP) Tahun anggaran 2023 pada aplikasi SIRUP. Oleh karena itu mengikuti himbauan dari Surat Edaran dari Badan Pengawas Pemilu RI maka Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur menggunakan aplikasi SIRUP sebagai platform untuk menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP). Penggunaan aplikasi SIRUP pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dapat membantu pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih transparan.

Manfaat aplikasi SIRUP sendiri bagi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan. Aplikasi SIRUP juga mempunyai manfaat untuk para pelaku usaha yaitu dapat membuka peluang usaha bagi para pelaku usaha dan juga dapat menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha (LKPP, 2021).

Namun dari manfaat manfaat yang ada diatas jelas ada beberapa hal yang menjadi masalah saat menggunakannya yaitu :

1. Server error yang terjadi padaa website aplikasi SIRUP
2. Kurangnya sosialisasi penerapan aplikasi SIRUP pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.

Pada permasalahan diatas diperkuat melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan pengguna aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur yang menyatakan “disini yang handle aplikasi SIRUP hanya satu orang yaitu saya saja” hal tersebut menjadi suatu masalah dikarenakan hanya ada satu orang yang mengelola aplikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa masalah tersebut, maka penelitian akan berfokus kepada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berada pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur. Dimana peneliti akan menganalisis serta memperoleh bukti secara empiris sehingga peneliti dapat mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (BAWASLU)”.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara lengkap, secara mendalam dan sistematis tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK Shool of Government dalam (Indrajit, 2016) yang meliputi *support, capacity, and value*. Pada penelitian ini memiliki sumber data berupa data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. support (dukungan)

- a. **Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu faktor utama keberhasilan negara dalam mencapai visi dan misinya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana faktor-faktor kunci keberhasilan lainnya.**

Pada konteks penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil temuan peneliti penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur telah membentuk transparansi khususnya pada saat melakukan proses

pengadaan barang dan jasa. Bentuk transparansi yang dimaksudkan yaitu masyarakat serta penyedia mampu mengetahui pengumuman RUP yang dilaksanakan oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi SIRUP. Penerapan aplikasi SIRUP juga membantu BAWASLU Provinsi Jawa Timur menjadi lembaga pemerintah yang terbuka dan akuntabel dalam melakukan layanan kepada publik. Penyedia juga dapat berkontribusi dalam pengadaan yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur secara terstruktur, melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah hingga masyarakat secara luas.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait elemen support yang membahas disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu faktor utama keberhasilan negara dalam mencapai visi dan misinya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana faktor-faktor kunci keberhasilan lainnya terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, sudah sejalan dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016).

b. Pemberian alokasi sumber daya yang mencakup manusia, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain pada setiap tingkat pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral

Mengacu pada kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan Pejabat Pengadaan di BAWASLU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa informasi yang disampaikan mengenai aplikasi SIRUP masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya upaya LKPP dalam menyosialisasikan aplikasi SIRUP kepada pihak-pihak terkait. Akan tetapi, dari segi sumber daya finansial Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung implementasi SIRUP. Pengalokasian sumber daya manusia sudah terlaksana namun hanya satu orang saja, yaitu Pejabat Pengadaan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait elemen support yang membahas mengenai pemberian alokasi sumber daya yang mencakup manusia, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain pada setiap tingkat pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral, terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, yang mengacu pada teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016), dapat disimpulkan bahwa pada beberapa aspek sudah sejalan dengan teori tersebut, seperti dialokasikannya sumber daya finansial terkait penerapan aplikasi SIRUP serta ada individu yang mengoperasikan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur. Terkait alokasi informasi dirasa masih belum maksimal, keterbatasan informasi ini dapat berdampak pada rendahnya pemahaman dan pemanfaatan aplikasi SIRUP secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan dalam strategi komunikasi serta sosialisasi yang efektif.

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan e-government (seperti penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, penugasan lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, serta penyusunan aturan kerja sama dengan sektor swasta, dan lain-lain)

Pentingnya penyusunan peraturan atau payung hukum yang jelas untuk penerapan e-government agar peraturan tersebut dapat mengatur kewajiban dan wewenang masing-masing pihak dalam pelaksanaan e-government, termasuk perlindungan data pribadi serta pengelolaan informasi publik, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamluddin, (2021) bahwa aspek legal merupakan dasar utama untuk memastikan suatu program dapat dijalankan. Dalam hal ini, aspek legal mengacu pada adanya dukungan kebijakan politik yang diwujudkan melalui Peraturan Daerah smart city yang disahkan

lembaga legislatif. Yang dimaksud smart city adalah penerapan e-government atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan berbagai sumber daya di sebuah kota yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolannya. Dalam hal ini selain menjadi payung hukum, Peraturan Daerah (PERDA) yang dibentuk tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan e-government.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait elemen support yang membahas mengenai dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan e-government (seperti penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, penugasan lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, serta penyusunan aturan kerja sama dengan sektor swasta, dan lain-lain) terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, sudah sejalan dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016). Dengan adanya dasar hukum atau payung hukum serta ditunjukkannya Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam penerapan aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dengan adanya dasar hukum tersebut memungkinkan penerapan aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar serta dapat melindungi pihak yang terlibat dalam penerapan aplikasi SIRUP.

d. Melakukan sosialisasi konsep e-Government secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat umum melalui berbagai kampanye yang bersifat simpatik

Sosialisasi terhadap penerapan e-government menjadi langkah yang krusial, karena dengan sosialisasi yang menyeluruh para pelaksana di lapangan dapat lebih percaya diri dalam menggunakan sistem baru ini, sehingga penerapannya dapat berjalan dengan lebih optimal, hal tersebut sejalan dengan pendapat Siregar W Nikita, (2024) bahwa sosialisasi konsep e-government secara luas, konsisten, dan menyeluruh merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan e-government di suatu wilayah. Melalui sosialisasi yang efektif, baik masyarakat maupun pemerintah dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan e-government, termasuk tujuan, manfaat, dan cara kerjanya, sosialisasi berperan penting dalam memperkuat hubungan antar individu, dan memastikan adanya hubungan yang baik di dalam organisasi pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, para pengguna aplikasi e-government akan lebih siap untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengelola aplikasi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait elemen support yang membahas mengenai melakukan sosialisasi konsep e-government secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat umum melalui berbagai kampanye yang bersifat simpatik terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016), masih memerlukan evaluasi terkait penerapannya, hal ini dijelaskan berdasarkan penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan. Pejabat Pengadaan selaku pengguna aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur mengeluhkan tidak maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak LKPP maupun BAWASLU RI, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi agar penerapan aplikasi SIRUP dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Capacity (kapasitas)

a. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk menjalankan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berhubungan dengan sumber daya keuangan

Sumber daya keuangan memungkinkan untuk melaksanakan pelatihan sumber daya manusia agar mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola penerapan e-government tersebut. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, penerapan e-government akan sulit berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ameri, (2021) penerapan e-government sangat di pengaruhi oleh ketersediaan sumber daya finansial di setiap lembaga yang mengimplementasikannya. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penerapan e-government di suatu lembaga.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait elemen capacity yang membahas mengenai tersedianya sumber daya yang memadai untuk menjalankan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berhubungan dengan sumber daya keuangan terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, sudah sejalan dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016). Dengan adanya sumber daya keuangan yang memadai dapat mendukung penerapan aplikasi SIRUP berjalan dengan optimal.

b. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting, karena fasilitas tersebut merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government

Mengacu pada wawancara yang peneliti lakukan dengan Pejabat Pengadaan dan Kepala Kesekretariatan BAWASLU Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia masih terbilang kurang memadai, mengingat sering terjadi server error pada aplikasi SIRUP. Masalah ini mengakibatkan pejabat pengadaan kesulitan mengakses aplikasi tersebut, terutama ketika Pejabat Pengadaan harus melakukan input Rencana Umum Pengadaan (RUP). Kondisi ini memaksa Pejabat Pengadaan untuk menunggu hingga malam hari dan di luar jam kerja untuk menggunakan aplikasi SIRUP dengan lancar. Situasi tersebut tidak hanya menghambat efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi produktivitas karena waktu yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan kegiatan input RUP terpaksa dialihkan dan kegiatan input RUP dilaksanakan saat di luar jam kerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait elemen capacity yang membahas mengenai Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting, karena fasilitas tersebut merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government terhadap penerapan aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016), masih memerlukan perbaikan infrastruktur, seperti peningkatan kapasitas server dan optimalisasi jaringan, hal tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan aplikasi SIRUP dapat diakses dengan stabil dan mendukung kelancaran proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sedang berlangsung

c. Ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang tepat diperlukan untuk memastikan penerapan e-government dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sesuai harapan.

Mengacu pada wawancara yang peneliti lakukan dengan Pejabat Pengadaan BAWASLU Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia di BAWASLU Provinsi Jawa Timur masih belum memadai untuk mendukung operasional di tingkat Provinsi Jawa Timur secara optimal. Dikarenakan sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur hanya Pejabat Pengadaan, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab untuk 33

Kabupaten/Kota di Jawa Timur maka dari itu sumber daya manusia yang di alokasikan untuk mengoperasikan aplikasi SIRUP tergolong kurang dan belum optimal. Pejabat Pengadaan juga menjelaskan bahwa penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur tidak disertakan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi (TI), hal itu mengakibatkan ketika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi, permasalahan tersebut seringkali diabaikan tanpa dilakukan penanganan segera dengan harapan sistem pada aplikasi akan kembali normal dengan sendirinya. Situasi ini mencerminkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan memberikan dukungan teknis terhadap aplikasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait elemen capacity yang membahas mengenai ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang tepat diperlukan untuk memastikan penerapan e-government dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sesuai harapan, terhadap penerapan aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016), dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang tepat masih tergolong kurang, dikarenakan pada realitanya di BAWASLU Provinsi Jawa Timur hanya terdapat satu orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi SIRUP dan tidak ada sumber daya manusia yang berkaitan dengan teknologi informasi, karena hal tersebut diperlukannya alokasi sumber daya manusia yang lebih mencukupi agar penerapan aplikasi SIRUP berjalan dengan lancar dan optimal.

3. Value (manfaat)

Mengacu pada wawancara yang peneliti lakukan dengan Pejabat Pengadaan dan Kepala Kesekretariatan di BAWASLU Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIRUP memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal transparansi terkait seluruh proses pengadaan di BAWASLU. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai pengadaan apa saja yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur selama tahun berjalan. Hal ini tentu saja mendukung terciptanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan, sehingga masyarakat juga dapat turut mengawasi dan memahami proses pengadaan yang berlangsung. Penerapan aplikasi SIRUP juga dapat mempermudah, karena dengan adanya aplikasi SIRUP pihak dari BAWASLU Provinsi Jawa Timur tidak perlu lagi bersusah payah mencari penyedia secara manual, para penyedia sudah mengetahui melalui aplikasi SIRUP ketika kami akan melaksanakan pengadaan. Hal tersebut membuat para penyedia secara proaktif berlomba-lomba mengikuti proses pengadaan tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan sekaligus meningkatkan efisiensi dan persaingan yang sehat di antara penyedia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait elemen value yang membahas mengenai apa manfaat penerapan aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dengan teori Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016), maka dapat disimpulkan bahwasanya penerapan aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan rencana pengadaan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya aplikasi SIRUP, informasi terkait rencana pengadaan dapat diakses oleh publik secara mudah, sehingga mendukung prinsip keterbukaan dan mencegah potensi penyimpangan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, ketiga indikator *support, capacity, and value*. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Support

- a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu faktor utama keberhasilan negara dalam mencapai visi dan misinya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana faktor-faktor kunci keberhasilan lainnya.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek kerangka e-government adalah tujuan dari e-government itu dibentuk, aplikasi SIRUP bertujuan untuk mentransparansikan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, bentuk transparansi yang dimaksudkan yaitu masyarakat serta penyedia mampu mengetahui pengumuman RUP yang dilaksanakan oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi SIRUP.

- b. Pemberian alokasi sumber daya yang mencakup manusia, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain pada setiap tingkat pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian alokasi sumber daya pada penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur sudah terlaksana, seperti dialokasikannya sumber daya manusia yang ditujukan untuk mengoperasikan aplikasi SIRUP dan dialokasikannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi SIRUP. Namun, alokasi sumber daya informasi yang diterima pengguna aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur dirasa masih kurang.

- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan e-government (seperti penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, penugasan lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, serta penyusunan aturan kerja sama dengan sektor swasta, dan lain-lain).

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah terlaksana, penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur memiliki dasar hukum yaitu Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengisian Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 Pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Dalam Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengisian Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 Pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) juga menjelaskan bahwa dasar hukum dari penerapan aplikasi SIRUP adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Aplikasi sirup dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

- d. dilakukan sosialisasi konsep e-Government secara merata, berkelanjutan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat umum melalui berbagai kampanye yang bersifat simpatik.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait penerapan e-government merupakan langkah yang penting, melalui sosialisasi yang merata para pengguna aplikasi dapat merasa lebih yakin dalam mengoperasikan sistem baru ini, namun pada kenyataannya sosialisasi terkait penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur belum cukup baik dikarenakan pengguna aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur dirasa tidak mendapatkan sosialisasi yang maksimal dari pihak pembuat aplikasi maupun dari BAWASLU RI.

2. Capacity (kapasitas)

- a. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk menjalankan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berhubungan dengan sumber daya keuangan.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur memiliki anggaran khusus yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi SIRUP.

- b. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting, karena fasilitas tersebut merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan aplikasi SIRUP kerap kali mengalami server error yang menyebabkan pengguna aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur tidak dapat mengakses aplikasi SIRUP, sehingga kegiatan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan menjadi tertunda.

- c. Ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang tepat diperlukan untuk memastikan penerapan e-government dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sesuai harapan.

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum berjalan cukup baik, dikarenakan orang yang mengoperasikan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur hanya ada satu orang, kondisi tersebut dirasa kurang cukup dan tidak adanya orang yang berkaitan mengenai teknologi informasi.

3. Value (manfaat)

Pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berjalan dengan baik, karena aplikasi SIRUP memberikan manfaat yang cukup signifikan di BAWASLU Provinsi Jawa Timur. Aplikasi SIRUP tidak hanya memudahkan pengelolaan rencana pengadaan barang dan jasa, tetapi juga memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mengoptimalkan efisiensi dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur secara berkala dan berlanjut, dengan dilakukannya sosialisasi tersebut pengguna aplikasi SIRUP di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur akan lebih memahami konsep dari aplikasi SIRUP. Dengan dilakukannya sosialisasi dengan intensitas yang

berlanjut maka akan terjadi diskusi dengan pengguna aplikasi SIRUP terkait kendala apa yang mereka hadapi saat menggunakan aplikasi SIRUP.

2. Meningkatkan kapasitas dari sistem aplikasi SIRUP sehingga dapat meminimalisir terjadinya server error pada aplikasi SIRUP. Pemeliharaan rutin pada sistem dan server bertujuan untuk memastikan aplikasi SIRUP berjalan optimal serta pengguna aplikasi SIRUP dapat bekerja secara real time dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di aplikasi SIRUP
3. Melakukan advokasi atau usulan kepada Badan Pengawas Pemilu Pusat agar dapat mendukung kebutuhan Sumber Daya Manusia tambahan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, mengingat pentingnya penerapan aplikasi SIRUP untuk menunjang kinerja organisasi serta Pejabat Pengadaan selaku pengguna aplikasi SIRUP dapat bekerja lebih maksimal.

Referensi

- Indrajit, R. E. (2016). *KONSEP DAN STRATEGI ELECTRONIC GOVERNMENT*. ANDI.
- LKPP. (2021). *Paparan Pengenalan dan Pemanfaatan SiRUP Bagi Pelaku Usaha*.
- Ningsih, M. (2018). *PENGARUH PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM DUNIA TEKNOLOGI DI INDONESIA*. www.hannovermesse.de,
- Septiani, E. (2021). IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN SMART CITY. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (Jan Maha)*, 3(3), 72–83.
- Yon Mariono. (2020). *EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA*. STIE Mahardhika .